

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2014. Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka diperoleh sampel 634 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Prosedur Pemilihan Sampel

Uraian	2013	2014	Jumlah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013-2014 di Indonesia	491	491	982
LKPD yang tidak tersedia tahun 2013-2014	(83)	(83)	(166)
LKPD Tahun 2013-2014 yang tidak menyajikan seluruh data dan informasi lengkap yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibutuhkan	(97)	(97)	(194)
Total Sampel	317	317	634

Berdasarkan tabel 4.1 total Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia berjumlah 982 selama 2013-2014. Namun, berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan peneliti terdapat 634 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil sampel dalam penelitian ini setelah diolah ternyata terdapat 27 *outlier*. Sehingga hasil akhir dari sampel penelitian berjumlah 607 sampel. Periode pengamatan yang diambil oleh peneliti adalah dua tahun yaitu tahun 2013 dan 2014.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan kualitas data penelitian yang tercermin pada nilai mean dan standar deviasi, apabila nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka kualitas data dapat dikatakan baik. Statistik Deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja_keuangan	607	,7302	1,5290	1,002269	,0585359
Posisi_Keuangan	607	,1149	7,5675	2,357530	,8169790
Solvabilitas	607	,4973	7,8613	2,519502	,8434826
Kemandirian_keuangan	607	,0062	3,6924	,121838	,2286884
Financial_distress	607	,0000	1,0000	,790774	,4070913
Valid N (listwise)	607				

Sumber : Output SPSS

Tabel 4.2 memberikan gambaran mengenai statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah sampel laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti adalah 607 laporan keuangan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel independen kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,7302 dan nilai maksimum sebesar 1,5290. Nilai rata-rata untuk variabel kinerja keuangan yaitu 1,002269; sedangkan untuk standar deviasi sebesar 0,0585359. Variabel Independen posisi keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,1149 dan

nilai maksimum sebesar 7,5675. Nilai rata-rata untuk variabel posisi keuangan yaitu 2,357530 dengan standar deviasi sebesar 0,8169790.

Variabel independen solvabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,4973 dan nilai maksimum sebesar 7,8613. Nilai rata-rata untuk variabel solvabilitas yaitu 2,519502 dengan standar deviasi 0,8434826. Variabel Independen kemandirian keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,0062 dan nilai maksimum sebesar 3,6924. Nilai rata-rata untuk variabel kemandirian keuangan yaitu 0,121838 dengan standar deviasi sebesar 0,121838. Untuk variabel dependen yaitu *financial distress* memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum 1,0000 karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy*. Untuk nilai rata-rata variabel *financial distress* yaitu sebesar 0,790774 dengan standar deviasi 0,4070913.

2. Menilai Kelayakan Data dan Model Regresi

Langkah awal yang dilakukan dalam analisis model logistik yaitu menguji kelayakan data dengan uji *Omnibus Tests of Model Coefficients*. Dalam pengujian ini minimal harus ada 1 variabel independen yang mampu memengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Apabila nilai sig yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tersebut diterima oleh regresi logistik dan dinilai layak untuk diolah. Untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model penelitian maka digunakan *Hosmer and Lameshow's Godness of Fit Test*. Jika nilai *Hosmer and Lameshow's Godness of Fit*

Test sama dengan atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol di tolak dan artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara model regresi dengan nilai observasinya.

Berdasarkan pengujian *Omnibus Tests of Model Coefficients* terlihat nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (lebih kecil dari α) menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini diterima oleh regresi logistik dan layak untuk diolah.

Hasil pengujian kelayakan data dengan *Omnibus Tests of Model Coefficients* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Menilai Overall Model Fit

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	199,158	4	,000
	Block	199,158	4	,000
	Model	199,158	4	,000

Sumber : Output SPSS

Selanjutnya berdasarkan pengujian *Hosmer and Lameshow's Goodness of Fit Test* untuk menguji kelayakan model, ditemukan nilai *Chi-square* sebesar 8,605 dengan nilai sig 0,377. Nilai Sig $0,377 > \alpha$ (0,05) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan untuk melanjutkan pengujian dalam penelitian ini.

Hasil pengujian kelayakan model dengan *Hosmer and Lemeshow's Godness of Fit Test* dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Pengujian Kelayakan Model

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	8,605	8	,377

Sumber : Output SPSS

3. Menilai *Overall Model Fit*

Pengujian pada penelitian ini dilakukan berdasarkan fungsi dari *likelihood*. *Log likelihood* dalam regresi logistik mirip dengan *sum of square error* pada model regresi. Apabila terdapat penurunan *log likelihood* maka menunjukkan bahwa model regresi telah baik. *Log likelihood* membandingkan antara nilai *-2Log Likelihood (-2LL)* awal dengan nilai *-2Log Likelihood (-2LL)* akhir. Adanya pengurangan nilai antara *-2LL* awal dengan nilai *-2LL* pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat nilai *-2LL* awal atau pada saat *blocknumber = 0* sebesar 622,701 dan nilai *-2LL* akhir atau pada saat *blocknumber = 1* sebesar 423,538. Sehingga *-2LL* awal lebih besar dari nilai *-2LL* akhir, dengan adanya penurunan sebesar 199,163 maka dapat disimpulkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Tabel 4.5
Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir

-2 Log likelihood	Nilai
Awal (Block Number = 0)	622,701
Akhir (Block Number = 1)	423,538

4. Menguji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabilitas variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *financial distress* dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio solvabilitas, dan rasio kemandirian keuangan. Koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell* untuk memastikan nilainya bervariasi dari nol sampai dengan satu. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell* dapat diinterpretasikan sesuai nilai *R-Square* pada regresi linear berganda.

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,436. Nilai *Nagelkerke's R Square* menunjukkan bahwa 43,60% variabel *financial distress* dipengaruhi oleh variabel rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio solvabilitas, dan rasio kemandirian keuangan, sedangkan sisanya sebesar 56,40% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Koefisien

determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke's R Square* sebagai berikut :

Tabel 4.6

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	423,538 ^a	,280	,436

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Output SPSS

5. Uji Multikolinearitas (*Corellation Matrix*)

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat korelasi diantara variabel independennya. Uji multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel independen.

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat tidak ada korelasi antar variabel yang nilainya lebih dari 0,90 seperti yang disebutkan Ghozali (2011), sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas pada model yang digunakan dalam penelitian.

Berikut hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.7

**Uji Multikolinieritas
Correlation Matrix**

	Constant	Kinerja_k euangan	Posisi_Keu angan	Solvabilitas	Kemandiria n_keuanga n
Step 1 Constant	1,000	-,957	-,209	-,039	,140
Kinerja_keuangan	-,957	1,000	,009	-,132	-,150
Posisi_Keuangan	-,209	,009	1,000	,017	-,414
Solvabilitas	-,039	-,132	,017	1,000	-,103
Kemandirian_keua ngan	,140	-,150	-,414	-,103	1,000

Sumber : Output SPSS

6. Tabel Klasifikasi

Penjelasan selanjutnya mengenai hasil output regresi logistik pada hasil matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio solvabilitas, rasio kemandirian keuangan dengan penjelasan tentang *financial distress*. Hasil matriks klasifikasi ini digunakan untuk memperjelas penggambaran atau ketepatan model regresi logistik dengan data penelitian, yang menunjukkan hasil prediksi dengan hasil penelitian.

Tabel 4.8**Tabel Klasifikasi****Classification Table^a**

		Predicted		
		FD		Percentage Correct
		NONDISTRESS	DISTRESS	
Observed				
S t e p 1	FD NONDISTRESS	50	77	39,4
	DISTRESS	26	454	94,6
Overall Percentage				83,0

a. The cut value is ,500

Sumber : Output SPSS

Hasil pada tabel 4.8 menunjukkan tingkat ketepatan prediksi model. Tabel diatas menunjukkan nilai estimasi non *financial distress* dan *financial distress*. Terdapat 127 pemerintah daerah yang diprediksi mengalami non *financial distress*, namun observasi menunjukkan hanya 50 pemerintah daerah yang mengalami *non financial distress*, sedangkan sisanya 77 pemerintah daerah diprediksi secara tidak tepat sebagai *non financial distress*. Jadi ketepatan prediksi *non financial distress* adalah 50/127 (39,40%).

Pemerintah daerah yang diprediksi mengalami *financial distress* sebanyak 480 pemerintah daerah, namun observasi menunjukkan 454 pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*, sedangkan sisanya 26 pemerintah daerah diprediksi secara tidak tepat sebagai *financial distress*. Jadi ketepatan prediksi *financial distress* adalah

454/480 (94,60%). Secara keseluruhan tingkat ketepatan prediksi adalah sebesar 83,00%.

Cut off value yang digunakan adalah sebesar 0,5. Pemerintah daerah dianggap mengalami *financial distress* apabila hasil estimasi dari model lebih atau sama dengan 0,50. Estimasi data yang benar secara keseluruhan adalah 83,00%. Besarnya kesalahan tipe I adalah sebanyak 77 data, dan besarnya kesalahan tipe II adalah sebanyak 26 data.

C. Hasil Pengujian Hipotesis (*Uji Wald*)

Uji wald yang terdapat di dalam analisis regresi logistik digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan dan perhitungan data menggunakan program SPSS 22.00 *for windows*. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 4.9

Uji Hipotesis

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Kinerja_keuangan	-4,107	2,012	4,167	1	,041	,016
Posisi_Keuangan	-1,626	,200	66,230	1	,000	,197
Solvabilitas	-,334	,139	5,778	1	,016	,716
Kemandirian_keuangan	33,518	4,449	56,761	1	,000	360254797710177
Constant	7,899	2,015	15,371	1	,000	2694,775

a. Variable(s) entered on step 1: Kinerja_keuangan, Posisi_keuangan, Solvabilitas, Kemandirian_keuangan.

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 di atas maka dapat dimasukkan ke model regresi logistik sebagai berikut :

$$\mathbf{FD = 7,899 - 4,107 \text{ KINERJA} - 1,626 \text{ POSGW} - 0,334 \text{ SOLV} + 33,518}$$

KK

Penarikan kesimpulan dengan jumlah sampel sebanyak 607 pemerintah daerah serta jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel dilakukan dengan membandingkan nilai *sig wald* dengan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai sig lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan arah koefisien sesuai dengan yang dihipotesiskan, maka H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya.

1. Pengujian Hipotesis Satu

Berdasarkan tabel 4.9 variabel rasio kinerja keuangan yang diukur dengan jumlah realisasi pendapatan dibagi dengan jumlah target pendapatan memiliki nilai koefisien -4,107 dengan nilai sig 0,041 < alpha 0,05 dan arah koefisien negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa rasio kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*, yang berarti semakin tinggi nilai rasio kinerja keuangan maka kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress* semakin rendah.

2. Pengujian Hipotesis Dua

Berdasarkan tabel 4.9 variabel rasio posisi keuangan yang diukur dengan *position government wealth* memiliki nilai koefisien -1,626 dengan

nilai sig $0,00 < \alpha 0,05$ dan arah koefisien negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa rasio posisi keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*, yang berarti semakin tinggi angka rasio posisi keuangan maka kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress* semakin rendah.

3. Pengujian Hipotesis Tiga

Berdasarkan tabel 4.9 variabel rasio solvabilitas yang diukur dengan total aset dibanding total utang memiliki nilai koefisien $-0,334$ dengan nilai sig $0,016 < \alpha 0,05$ dan arah koefisien negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*, yang berarti semakin tinggi nilai rasio solvabilitas maka kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress* semakin rendah.

4. Pengujian Hipotesis Empat

Berdasarkan tabel 4.9 variabel rasio kemandirian keuangan yang diukur dengan jumlah PAD dibagi bantuan pemerintah pusat/provinsi memiliki nilai koefisien $33,518$ dengan nilai sig $0,000 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i>	Diterima
H ₂	Rasio posisi keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i> .	Diterima
H ₃	Solvabilitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i> .	Diterima
H ₄	Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i> .	Ditolak

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio solvabilitas, dan rasio kemandirian keuangan dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia. Status *financial distress* dalam sektor publik adalah ketidakmampuan pihak pemerintah untuk menyediakan pelayanan kepada publik yang sesuai dengan standar mutu dan pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah tersebut dikarenakan pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menginvestasikannya pada infrastruktur yang digunakan untuk pelayanan publik.

1. Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel rasio kinerja keuangan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress* dengan arah koefisien negatif sesuai yang telah dihipotesiskan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini digambarkan dengan sejauh mana target pendapatan mampu terealisasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Atmaja (2012), Sutaryo dkk. (2010) dan Husniati dkk. (2010).

Kinerja keuangan juga mampu digambarkan dari surplus pemerintah daerah. Semakin tinggi surplus pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula angka rasio kinerja keuangan pemerintah daerah (Sutaryo dkk., 2010). Rasio kinerja keuangan yang baik dalam penelitian ini ditandai dengan hasil hitung realisasi pendapatan dibanding target pendapatan yang tinggi. Semakin tinggi rasio kinerja keuangan maka menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan semakin efektif pemerintah kabupaten/kota dalam anggarannya. Keefektifan tersebut akan mempengaruhi besar proporsi belanja modal untuk pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan yang maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Karena pelayanan publik mampu terpenuhi dengan pendapatan daerah yang tinggi.

2. Rasio posisi keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel rasio posisi keuangan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress* dengan arah koefisien negatif sesuai yang telah dihipotesiskan. Rasio posisi keuangan merupakan ukuran untuk posisi keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara jumlah total bersih aset dengan jumlah total pendapatan. Semakin tinggi angka rasio *posGW* maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah dana dan sumber daya yang tinggi hingga mampu membiayai proses kegiatan pemerintah dalam menyediakan pelayanan, sehingga semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Dengan kalimat lain yaitu semakin tinggi tingkat posisi keuangan pemerintah semakin kecil pula kemungkinan *financial distress*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sutaryo dkk. (2010) dan Atmaja (2012). Satu persen kenaikan *posGW* akan menurunkan kondisi *financial distress*. Rasio *posGW* yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai pendapatan yang tinggi, sehingga selain mampu membiayai kegiatan

operasi juga mampu melakukan pendanaan aset daerah dalam aktiva tetap tanpa mengalami kesulitan keuangan Sutaryo (2010).

Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal (Atmaja, 2012). Namun dalam perkembangannya, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah (Atmaja, 2012).

3. Rasio solvabilitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel rasio solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress* dengan arah koefisien negatif sesuai yang telah dihipotesiskan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sutaryo dkk. (2010) namun tidak sejalan dengan penelitian Syurmita (2014) dan Husniati dkk. (2016) yang menunjukkan hasil sebaliknya

yaitu tidak ditemukan pengaruh rasio solvabilitas terhadap kemungkinan *financial distress*.

Dengan adanya pinjaman daerah (hutang), pemerintah dapat melakukan kegiatan perekonomian daerah jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan perekonomian daerah, dan pinjaman daerah (hutang) merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan perekonomian.

Semakin besar pinjaman daerah tidak akan membuat pemerintah memiliki kemampuan rendah dalam memenuhi hutangnya. Kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam memenuhi hutangnya akan dijamin atau ditutupi oleh aset pemerintah daerah tersebut. Bukti empiris yang ditemukan adalah pemerintah daerah dengan hutang yang tinggi berkecenderungan untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibanding pemerintah yang mempunyai jumlah hutang rendah (Sutaryo, 2010). Semakin tinggi *total assets to total debt ratio* semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan keuntungan. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen keuangan tinggi, cenderung tidak akan mengalami *financial distress*.

4. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel rasio kemandirian keuangan pemerintah berpengaruh

secara signifikan terhadap *financial distress* dengan arah koefisien positif, sehingga berlawanan dengan hasil yang diharapkan dan hipotesis keempat yang menyatakan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sartika (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kemandirian keuangan berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien positif terhadap kemungkinan *financial distress* pemerintah daerah. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Husniati dkk. (2010) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan *financial distress*. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Syurmita (2014) yang menunjukkan hasil bahwa variabel kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap kemungkinan *financial distress*.

Jadi semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah maka akan semakin sulit pula kondisi keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan infrastruktur publik atau dengan kata lain, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Selain itu dari sampel penelitian memang menunjukkan apabila daerah dengan rasio kemandirian keuangan tinggi juga memiliki *financial distress* yang tinggi. Kenyataannya adalah yang terjadi di

kabupaten dan kota di Indonesia. Contohnya di Kabupaten Badung, kabupaten tersebut memiliki nilai rasio kemandirian keuangan yang tinggi namun tingkat *financial distress*nya juga tinggi, hal tersebut terjadi karena kabupaten tersebut masih boros di belanja pegawai dan belanja barang. Sebaliknya Kab. Empat Lawang yang rasio kemandirian keuangannya rendah namun tingkat *financial distress*nya jauh lebih rendah dari Kabupaten Badung. Hal tersebut terjadi karena Kab. Empat Lawang mampu memaksimalkan transfer dana yang ada untuk memberikan kepentingan untuk publik bukan untuk pemborosan belanja pegawai dan lainnya.

Jadi, kenapa dalam penelitian ini variabel kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *financial distress* yaitu karena yang terjadi sesungguhnya di pemerintah daerah adalah prioritas masing-masing pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatannya masih berbeda-beda dan pemerintah daerah belum menyadari akan pelayanan publik yang sebenarnya dalam undang-undang wajib dipenuhi. Selain itu, Nurhidayati dan Yaya (2013) mengungkapkan bahwa suatu daerah berkemungkinan memiliki angka nominal anggaran dan kemandirian keuangan yang tinggi, namun apabila tidak diimbangi dengan *political will* yang tinggi pula, pelayanan yang diberikan untuk publik perlu dipertanyakan.